



***FLYPAPER EFFECT* PADA DANA ALOKASI UMUM
(DAU) DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TERHADAP BELANJA DAERAH PADA
KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Yunita Indah Tauladani
NIM 070810391237

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2010**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita Indah Tauladani

NIM : 070810391237

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : ”*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sembernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Mei 2010
Yang menyatakan,

Yunita Indah Tauladani

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah
pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

Nama Mahasiswa : Yunita Indah Tauladani

NIM : 070810391237

Jurusan : Akuntansi / S1 Reguler Sore

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak
NIP 195911101989021001

Dr. Hj. Siti Maria W, M.Si, Ak
NIP 196608051992012001

Ketua
Program Studi Akuntansi

Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak
NIP 197204162001121001

PENGESAHAN

**FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP
BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN DAN
KOTA DI JAWA TIMUR**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Yunita Indah Tauladani

NIM : 070810391237

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal :

24 Mei 2010

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Tim Penguji

Ketua : Nining Ika Wahyuni, SE, M.Si, Ak : (.....)
NIP 198306242006042001

Sekretaris : Drs.Imam Mas'ud, M.Si, Ak : (.....)
NIP 195911101989021001

Anggota : Dr. Hj.Siti Maria W, M.Si, Ak : (.....)
NIP 196608051992012001

Mengetahui ;
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,



Prof. Dr. H.Moh Saleh, M.Sc
NIP 195608311984031002

MOTTO

Segala sesuatu yang direncanakan dan mengedepankan kedisiplinan akan memberikan hasil yang lebih baik daripada tindakan yang tidak terarah.

(Penulis*)

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri.

(Benyamin Franklin **)

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(AlQur'an, Al-Insyirah ***)

*) Yunita. 2010

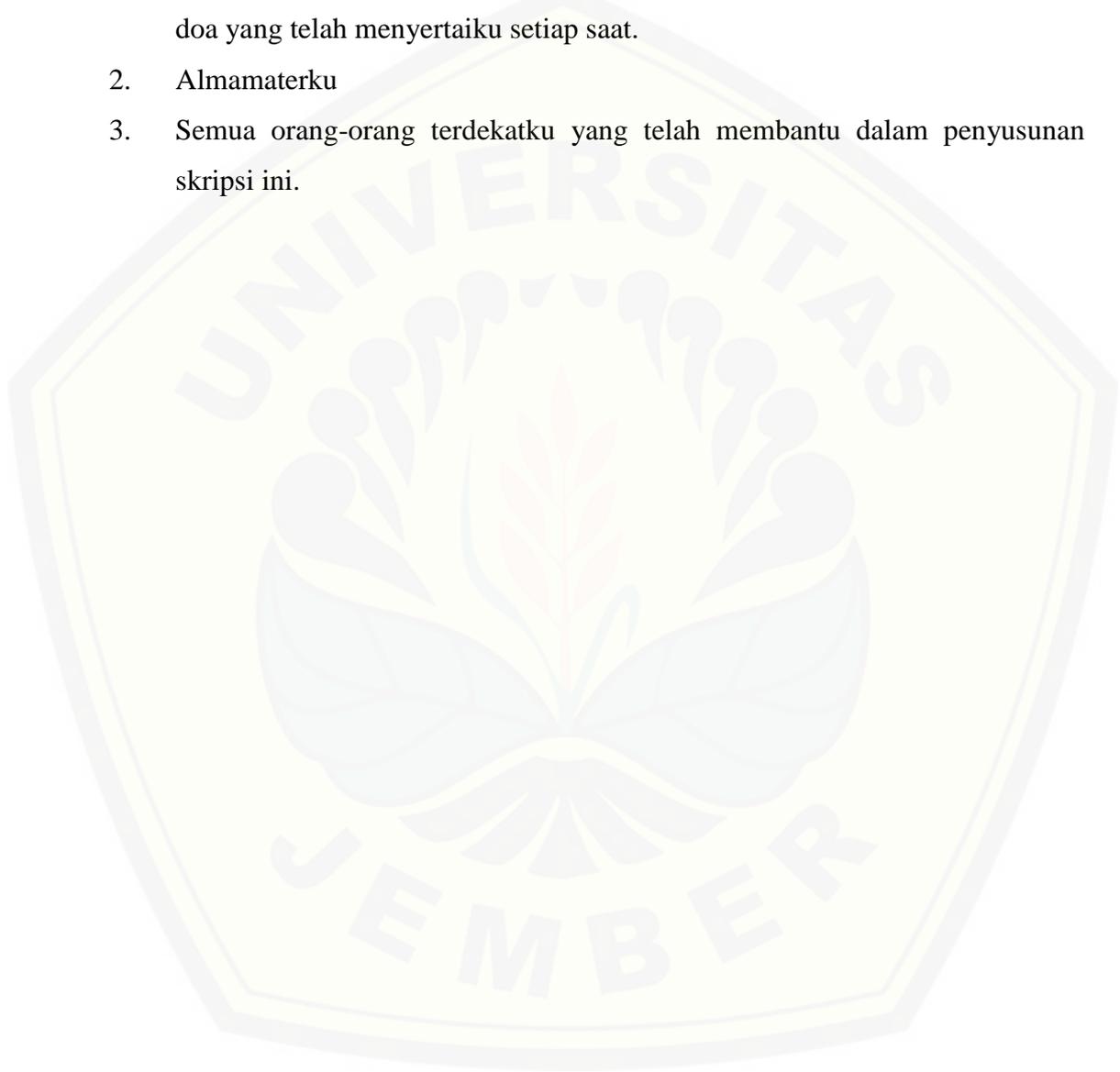
**) <http://ancreative.blogspot.com/2009/05/kumpulan-moto.html>

***) Depag RI. *Syaamil AlQur'an*. Al-Insyirah ayat 5. Bandung : Syaamil International

Persembahan

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membimbing, mendukung serta doa yang telah menyertaiku setiap saat.
2. Almamaterku
3. Semua orang-orang terdekatku yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.



ABSTRACT

The purpose of the analysis is to analyzed the effect of DAU and PAD toward region expenditure of The City in East Java Province. By using multiple regression analysis knowing that DAU and PAD have positive significant effect toward region expenditure.

DAU has a dominant effect toward region expenditure of The City in East Java Province. This condition shows that DAU has more effect toward region expenditure than PAD, it means flaypaper effect happen.

The point of determinant coefficient is 97.5%, it means the independent variable DAU and PAD have a significant effect 97.5% toward region expenditure. It means variable region expenditure influenced by other variable only 2.5%.

Keywords : *DAU, PAD, region expenditure*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Tetapi berkat pertolongan Allah SWT serta dorongan dan bimbingan semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain itu, dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung. Sebagai ungkapan bahagia, maka pada kesempatan ini penulis mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

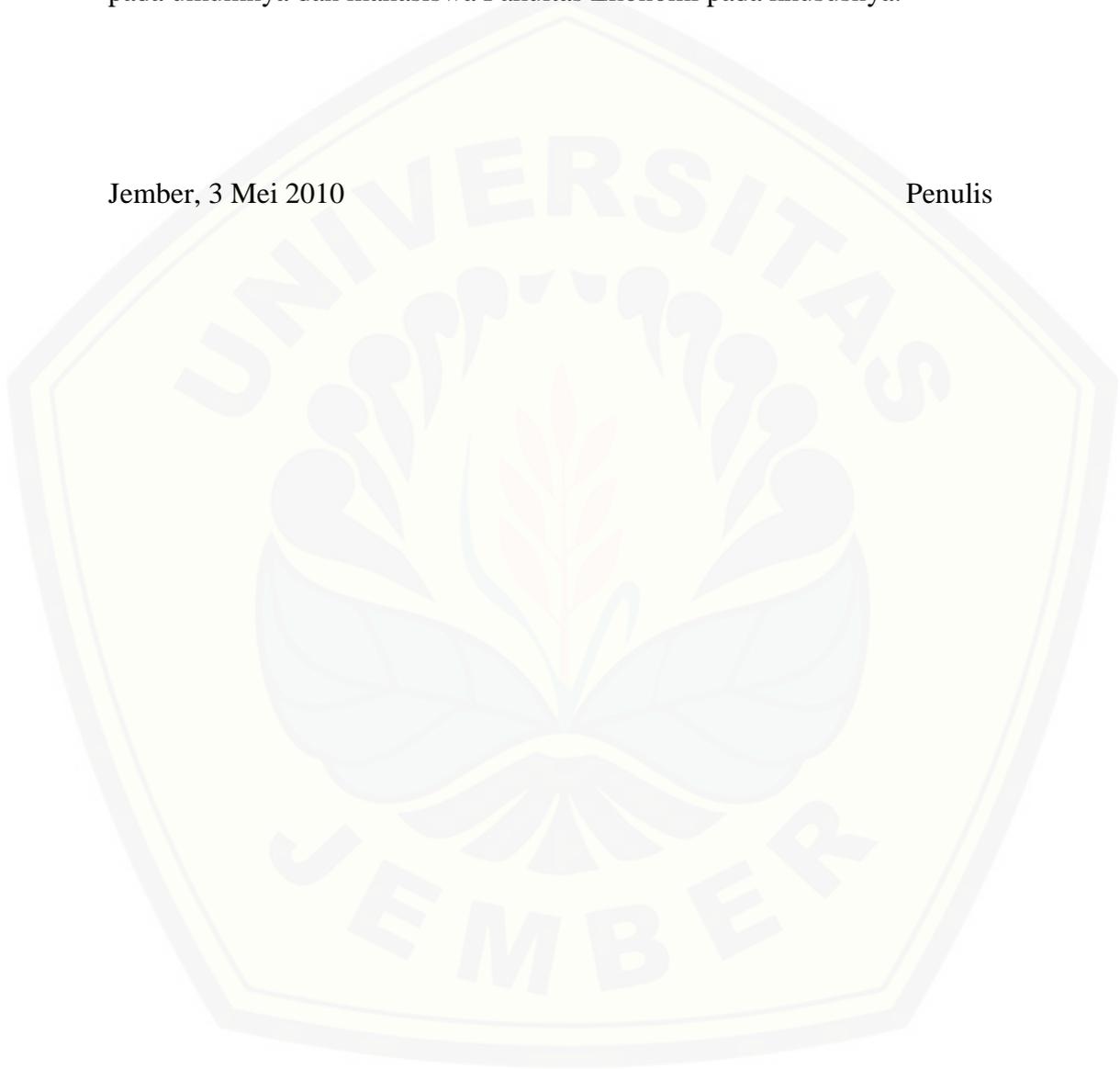
1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Saleh, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Maria W, M.Si, Ak, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Semua orang yang telah membantu penulisan skripsi ini.
7. Teman-temanku angkatan 2007.
8. Seluruh pihak yang membantu semangat dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki, maka disadari sepenuhnya skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat diharapkan.

Akhirnya, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan guna bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Ekonomi pada khususnya.

Jember, 3 Mei 2010

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kajian Teoritis	5
2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi	5
2.1.2 Belanja Daerah	7
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian	10

2.3.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah	10
2.3.2 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah	11
2.3.3 <i>Flypaper Effect</i>	12
2.3.4 Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> pada Prediksi Belanja Daerah	13
2.4 Kerangka Konseptual atau Model Penelitian	14
BAB 3. METODE PENELITIAN	16
3.1 Jenis dan Sumber Data	16
3.1.1 Jenis Data	16
3.1.2 Sumber Data	16
3.2 Populasi Penelitian	17
3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Serta Pengukuran Variabel	17
3.3.1 Variabel Dependen	17
3.3.2 Variabel Independen	17
3.4 Teknik Analisa Data	18
3.4.1 Uji Asumsi Klasik	18
3.4.2 Pengujian Hipotesis	20
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	23
4.2 Hasil Pengujian	23
4.2.1 Statistik Deskriptif	23
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	24
4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda	30
4.2.4 Pembahasan	32
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	36
5.1 Kesimpulan	36

5.2 Keterbatasan.....	37
5.3 Saran	37

DAFTAR PUSTAKA

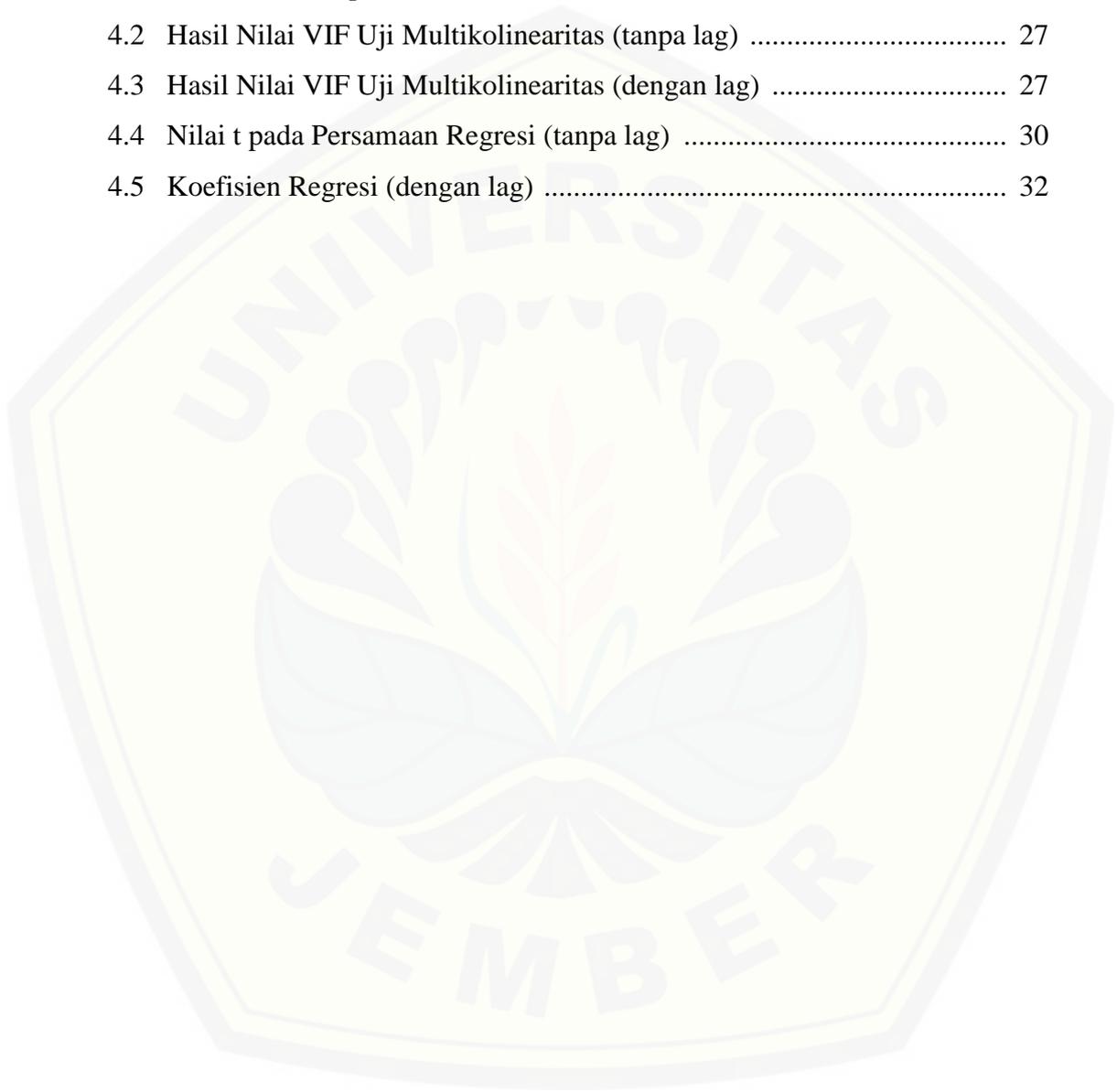


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual atau Model Penelitian I	14
2.2 Kerangka Konseptual atau Model Penelitian II	15
4.1 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual (tanpa lag).....	25
4.2 Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual (dengan lag).....	26
4.3 Grafik <i>Scatterplot</i> Persamaan Regresi (tanpa lag)	28
4.4 Grafik <i>Scatterplot</i> Persamaan Regresi (dengan lag)	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Statistik Deskriptif	23
4.2 Hasil Nilai VIF Uji Multikolinearitas (tanpa lag)	27
4.3 Hasil Nilai VIF Uji Multikolinearitas (dengan lag)	27
4.4 Nilai t pada Persamaan Regresi (tanpa lag)	30
4.5 Koefisien Regresi (dengan lag)	32



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal Januari tahun 2001 Indonesia telah mengalami perubahan dalam hal sistem pemerintahan, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001 telah ditetapkan sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan UU nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah diperbaharui dengan dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 dijelaskan tentang hak, wewenang, dan kewajiban otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002). Pemberian otonomi daerah juga diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Dalam UU nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari dana bagi hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping dana perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan lain-lain. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada

Pemerintah Daerah. Seharusnya dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemda untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Kepmendagri No. 29/2002 bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas pengelolaan dana yang dikelolanya, Pemerintah Daerah (PEMDA) diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada daerah yang meliputi : (1) neraca daerah menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu, (2) laporan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memuat informasi tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah (PEMDA) selama periode anggaran tertentu, meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan (3) laporan aliran kas menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam menghasilkan dan menggunakan kas dari aktivitas yang dilakukan, meliputi operasi, investasi, dan pendanaan.

UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, antara lain berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari Pemerintah Pusat. Dana perimbangan tersebut berupa dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat, daerah juga mempunyai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan daerahnya yang diperoleh melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, pajak dari BUMD dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah (PEMDA) untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, kemudian dilaporkan di perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut Oates (1999) (dalam Kuncoro, 2008) tujuan utama implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal daerah. Transfer

tersebut diberikan karena kemampuan keuangan dan ekonomi setiap daerah berbeda, khususnya di Pulau Jawa. Terdapat daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang melimpah tetapi struktur ekonomi daerah tersebut tertata dengan baik, maka pajak daerah yang dihasilkan dapat optimal sehingga membuat daerah ini kaya. Namun, terdapat daerah yang benar-benar miskin dan struktur ekonominya tidak tertata dengan baik. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates (dalam Kusumadewi & Rahman, 2007) menyatakan bahwa, ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect*. Menurut Turnbull (1998) (dalam Kuncoro, 2008) *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja Pemerintah Daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Sedangkan menurut Gorodnichenko (2001) (dalam Kuncoro, 2008) *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi. Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan latar belakang inilah tidak terlalu berlebihan jika peneliti ingin menganalisis **”flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ?
- b. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ?

- c. Apakah pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ?
- d. Apakah *flypaper effect* berpengaruh terhadap peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengajukan penelitian ini dengan tujuan :

- a. Untuk menguji pengaruh DAU terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
- b. Untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
- c. Untuk menguji pengaruh DAU terhadap belanja daerah yang lebih besar dari pada pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur
- d. Untuk menguji bahwa *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi Pemerintah Jawa Timur
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang menyertai kebijakan tersebut.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini merupakan wujud aktualisasi peneliti yang diperoleh selama kuliah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi

Berdasarkan pasal 5 bab IV UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah terdiri atas :

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase pajak dan sumber daya alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari :

a) Pajak

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 25 dan pasal 29.

b) Sumber Daya Alam

Berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut :

1. DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN

2. DAU untuk daerah propinsi dan untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari DAU sebagaimana ditetapkan diatas.
 3. DAU untuk suatu daerah Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah DAU untuk seluruh daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam APBN dengan porsi daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan
 4. Porsi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan terhadap jumlah bobot semua daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut UU No. 34 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah asli, antara lain :

1. Pajak Daerah, merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak daerah untuk Kabupaten terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ada tiga golongan retribusi daerah :

- a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta
- c. Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana/fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan
- d. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan. Yang termasuk dalam jenis pendapatan ini yaitu deviden atau bagian laba yang diperoleh oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibagikan bagi pemegang saham, dalam hal ini merupakan pendapatan bagi Pemerintah Daerah
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Yang tergolong dalam jenis pendapatan ini antara lain pendapatan bunga deposito, jasa giro, hasil penjualan surat berharga investasi, pendapatan dari ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah, denda, penggantian biaya, dan lain-lain.

2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang menjadi beban daerah dalam satu periode anggaran. Belanja pemerintah daerah dalam APBD dikelompokkan sebagai berikut :

1. Belanja operasi. Belanja operasi merupakan jenis belanja yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi :
 - a. Belanja pegawai. Belanja pegawai (Kelompok belanja operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik) merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk orang/personal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.
 - b. Belanja barang, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - c. Belanja perjalanan, merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 - d. Belanja pemeliharaan.
2. Belanja modal. Jenis belanja ini merupakan belanja yang manfaatnya dapat diperoleh lebih dari satu tahun dan dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan daerah, yang mana dari aset atau kekayaan tersebut akan menimbulkan belanja lainnya. Belanja modal terdiri dari :
 - a. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum
 - b. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.
3. Belanja transfer, merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran : angsuran pinjaman, dana bantuan, dan dana cadangan.
4. Belanja tak terduga, yaitu belanja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penganganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

a. Kusumadewi dan Rahman (2007)

Penelitian ini menggunakan sampel 225 daerah di kabupaten dan kota yang tersebar di 30 propinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2001 – 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih kuat daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih stimulus oleh jumlah DAU yang diterima pada tahun berjalan daripada PAD-nya sendiri. Hal ini membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD.

Dari pengelompokan daerah berdasarkan nilai Derajat Otonomi Fiskal (DOF) masing-masing daerah, diperoleh dua kondisi daerah yaitu daerah dengan PAD tinggi (daerah dengan DOF diatas rata-rata) dan daerah dengan PAD rendah (daerah dengan DOF dibawah rata-rata). Dengan menggunakan regresi berganda diketahui bahwa variabel DAU pada masing-masing kondisi daerah memiliki pengaruh lebih kuat terhadap belanja daerah daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Ini mengindikasikan bahwa *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD rendah dan juga daerah dengan PAD tinggi.

b. Maimunah (2006)

Bahwa besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai belanja daerah pada Kabupaten atau Kota di Sumatra. Hal ini terbukti dengan hasil analisis bahwa DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah baik atau tanpa menggunakan *lag*. Selain itu juga meneliti apakah terjadi pengaruh *flypaper effect* pada daerah kaya dan miskin. Pengaruh *flypaper effect* pada kategori pengeluaran dan juga pengaruh *flypaper effect* terhadap belanja daerah itu sendiri.

Hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya DAU dan PAD berpengaruh terhadap belanja daerah pada kota dan kabupaten di Sumatra, sehingga ini terbukti adanya *flypaper effect* pada belanja daerah kota dan kabupaten di Sumatra. Sedangkan *flypaper effect* sendiri terjadi di kabupaten dan kota baik yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi. Hal ini berarti bahwa kabupaten dan kota sama-sama bergantung pada DAU.

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah

Chang Tsangyao & Yuang Ho (2002), dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan pendapatan dan belanja daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan tersebut diuji secara empiris (dalam Prakosa, 2004). Aziz (2000) dan Doi Takero (1998) (dalam Prakosa, 2004) menyatakan bahwa, pendapatan mempengaruhi belanja, sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa belanjalah yang mempengaruhi pendapatan. Menurut Gamkhar Oates (1996) (dalam Maimunah, 2006) bahwa pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Namun dalam studi empiris hal tersebut tidak selalu terjadi. Artinya, stimulasi terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* tersebut sering lebih besar dibandingkan dengan stimulus dari pendapatan (pajak) daerah sendiri (*flypaper effect*).

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri.

Dengan konsep ini maka hipotesis alternatif untuk melihat pengaruh DAU tahun berjalan (DAU_t) terhadap belanja daerah tahun berjalan (BD_t) untuk Pemda Kabupaten dan Kota di Jawa Timur adalah :

H1 : Dana Alokasi Umum (DAU_t) berpengaruh terhadap Belanja Daerah (BD_t)

2.3.2 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Aziz *et al* (2000), Balckley (1986), Joulfaian & Mokeerjee (1990), Legrensi & Milas (2001), Von Fursten berg *et al* (1986) (dalam Maimunah, 2006) tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan. Mereka menyatakan bahwa, pendapatan (terutama pajak) akan mempegaruhi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hyphotesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan pemerintah daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Dalam konteks internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja di antaranya adalah Cheng (1999), Friedman (1978), Hoover & Sheffrin(1992) (dalam Prakosa, 2004). Cheng (1999) (dalam Prakosa, 2004) menemukan bahwa, hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus pemda di beberapa negara Amerika Latin, yakni Kolombia, Republik Dominika, Konduras, dan Paraguay. Friedmen (1978) (dalam Prakosa, 2004) menyatakan bahwa, kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal senada dikemukakan oleh Hoover dan Sheffrin (1992) (dalam Prakosa, 2004) yakni secara empiris menemukan akan perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu yang berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pajak dan belanja tidak mempengaruhi (*causally independent*).

Dalam beberapa penelitian, hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah mempengaruhi anggaran belanja Pemerintah Daerah disebut dengan *tax-spend hypothesis*. Hipotesis ini mengandung makna bahwa kebijakan Pemerintah Daerah dalam menganggarkan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah yang diterima.

Berdasarkan landasan teori di atas maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)_t berpengaruh terhadap (BD)_t.

Flypaper Effect

Flypaper effect merupakan stimulus terhadap pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer atau *grants* lebih besar dibandingkan dengan stimulus pendapatan (pajak) daerah sendiri (dalam Prakosa, 2004). Oates (1999) (dalam Kusumadewi dan Rahman, 2007) menyatakan bahwa beberapa penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya sendiri maka disebut *flypaper effect*.

Penelitian Legrenzi dan Milas (2001) (dalam Maimunah, 2006) memberikan bukti empiris tentang adanya *flypaper effect* dalam jangka panjang untuk sampel *municipalities* di Italia. Mereka menyatakan bahwa *local governments consistently increase their expenditure more with respect to increase in state transfer rather than increase in own revenues*. Zampelli (1986) (dalam Maimunah, 2006) memberikan bukti senada untuk data pemerintah kota di Amerika Serikat, yakni terjadinya *flypaper effect* dalam reaksi belanja terhadap *unconditional grants*. Sedangkan menurut Hines & Thales (1995) (dalam Maimunah, 2006) menyatakan bahwa, *flypaper effect* dianggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai (tambahan) pendapatan masyarakat seperti halnya pajak daerah, sehingga mestinya dihabiskan (dibelanjakan) dengan cara yang sama pula.

Dengan melihat beberapa penelitian yang pernah dilakukan di atas telah memberikan fakta bahwa pemerintah daerah tersebut masih bergantung kepada pemerintah pusat. Ini terbukti dengan adanya *Flypaper Effect* pada daerah-daerah yang menjadi obyek penelitian. Ini juga bisa berarti bahwa daerah yang bersangkutan belumlah mandiri.

Dari penelitian-penelitian dan fakta yang telah terurai di atas, maka ditarik hipotesis yang ketiga yaitu:

H3 : Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)_t terhadap Belanja Daerah (BD)_t lebih besar daripada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)_t terhadap Belanja Daerah (BD)_t

Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Prediksi Belanja Daerah

Holtz-Eakin *et al* (1985) (dalam Maimunah, 2006) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan belanja Pemerintah Daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemerintah Daerah dalam jangka pendek disesuaikan dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non linier* dan *asymmetric*.

Penelitian yang pernah dilakukan Abdullah dan Halim (dalam Kusumadewi dan Rahman, 2007) tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia dengan menggunakan sampel Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali dengan tahun penelitian tahun 2001 dan 2002. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap prediksi belanja daerah, baik dengan maupun tanpa lag. Ketika tidak menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat dari pada DAU. Tetapi dengan menggunakan lag pengaruh DAU terhadap belanja daerah justru lebih kuat dari pada PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemerintah Daerah terhadap DAU dan PAD. Ketika kedua faktor DAU dan PAD diregres serentak dengan belanja daerah, pengaruh keduanya juga signifikan,

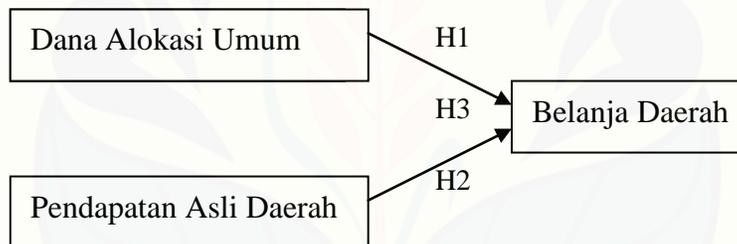
baik dengan maupun tanpa lag. Dalam model prediksi tanpa lag, daya prediksi DAU lebih rendah dari PAD, tetapi sebaliknya dalam prediksi dengan lag. Dengan demikian terjadi *flypaper effect*.

Berdasarkan penelitian yang ada, maka hipotesis untuk menguji hubungan DAU sebagai prediksi belanja daerah periode berikutnya adalah :

H4 : Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh DAU_t terhadap BD_t

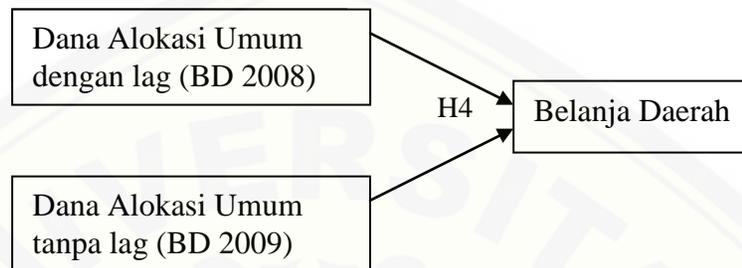
2.4 Kerangka Konseptual atau Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual atau Model Penelitian I



Gambar 2.2

Kerangka Konseptual atau Model Penelitian II

Keterangan :

Gambar 1 merupakan model penelitian untuk hipotesis 1, 2, dan 3. H_1 adalah hipotesis untuk menguji pengaruh DAU terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. H_2 adalah hipotesis untuk menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. H_3 adalah hipotesis untuk menguji apakah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur.

Gambar 2 merupakan model penelitian untuk hipotesis 4. H_4 adalah hipotesis untuk menguji hubungan DAU sebagai prediksi belanja daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur untuk periode berikutnya. Dalam hipotesis ini menggunakan lag satu tahun yaitu DAU_{t-1} dan PAD_{t-1} terhadap (BD_t) . Hasil pengujian dengan lag tersebut akan dibandingkan dengan pengujian tanpa lag yaitu DAU_t dan PAD_t terhadap (BD_t) . Pengujian ini digunakan untuk memprediksi besarnya belanja daerah untuk tahun berikutnya.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dinilai dengan angka (Kuncoro, 2001:23). Penelitian ini mengambil data dari situs Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, melalui internet (www.djpk.depkeu.go.id) maupun dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro & Supomo, 2002:147). Disamping itu juga menggunakan data *cross section* dan *time series* data (*pooling* data). Data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu dan *time series* data yang merupakan data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Sedangkan *pooling* data merupakan kombinasi antara data runtut waktu dan silang tempat (Kuncoro, 2001:23).

3.1.2 Sumber Data

Penelitian ini berbentuk kasus dengan menggunakan data sekunder. Penelitian yang dilakukan sifatnya studi empiris dengan menganalisis laporan anggaran dan realisasi APBD pada Kota dan Kabupaten di Jawa Timur tahun 2008-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah.

3.2 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Timur dalam periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Timur adalah sebanyak 29 Kabupaten dan 9 Kota (sumber :BPS).

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel serta Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja daerah. Belanja daerah diukur dengan menggunakan seluruh total belanja daerah.

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adalah salah satu transfer dana pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dilokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (www.djpk.depkeu.go.id). Dana Alokasi Umum diukur dengan menggunakan seluruh total Dana Alokasi Umum.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah penerimaan yang diperoleh dari daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:64). PAD diukur dengan menggunakan seluruh total PAD yang meliputi : pos pajak

daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah.

c. *Flypaper Effect*

Telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa *flypaper effect* merupakan perbedaan stimulus antara dana yang ditransfer pemerintah dengan pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pengeluaran daerah yang ditimbulkan oleh transfer lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah sendiri (Prakosa, 2004) Dihitung dari selisih besarnya *flypaper effect* dari DAU dan PAD. Untuk menghitung *flypaper effect* tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi, yaitu $Y = a + b_1 \text{ DAU} + b_2 \text{ PAD}$. Maka :

$$\text{Flypaper DAU} = b_1 \times \text{DAU}$$

$$\text{Flypaper PAD} = b_2 \times \text{PAD}$$

Jadi pengukuran *flypaper effect* :

$$(b_1 \times \text{DAU}) - (b_2 \times \text{PAD})$$

Keterangan :

Y : belanja daerah

a : konstanta

b_1 : koefisien DAU

b_2 : koefisien PAD

DAU = besarnya DAU

PAD = besarnya PAD

3.4 Teknik Analisis Data

Prosedur yang digunakan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut :

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Agar model persamaan regresi linier berganda dapat diterima secara ekonometrik dan estimator-estimator yang diperoleh dengan metode-metode kuadrat terkecil (QLS) sudah memenuhi syarat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE), maka harus diadakan pengujian untuk memenuhi asumsi klasik. Pengujian asumsi

klasik tersebut adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Model regresi linier berganda disebut sudah memenuhi BLUE apabila persamaan regresi linier berganda datanya berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinearitas, heterokedastisitas, dan auto korelasi.

a. Uji Normalitas Model

Model regresi linier berganda dapat dikatakan sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas dan terbatas pada asumsi-asumsi klasik statistik (Santoso, 2002:57). Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah dengan melihat *Normal Probability Plot Of Standarized Residual* yang akan ditunjukkan dengan titik-titik penyebaran sampel. Apabila titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mendeteksi multikolinearitas, yaitu diantaranya dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian asumsi multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai *tolerance*. Jika VIF lebih dari 10 dan *tolerance* sebesar 0,1 maka terdapat korelasi yang tinggi diantara salah satu variabel bebas dengan variabel lainnya (Ghozali, 2005:91).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homokedastisitas dan jika varian berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Jurnal Manajemen, 2009).

Salah satu cara yang dipakai untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai variabel terikat dengan residualnya. Dasar analisis yang digunakan menurut Ghozali (2001:69) adalah :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang ada menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai hubungan diantara data observasi yang terjadi runtut waktu (jika data runtut waktu) atau pada ruang (jika data lintas seksi). Secara singkat *Durbin-Watson* menyatakan bahwa jika nilai statistik *Durbin-Watson* mendekati 2, baik dari kiri maupun kanan, tidak ada autokorelasi. (Arikunto, 2002)

3.4.2 Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan alat analisis yaitu regresi sederhana (*simple regression*) dan regresi berganda (*multiple regression*). Hasil analisis berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Regresi sederhana dan berganda yang dipakai untuk memenuhi tujuan penelitian dalam membuktikan hipotesis dijabarkan di bawah ini dalam bentuk persamaan-

persamaan. Berikut persamaan-persamaan yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1,2,3, dan 4 :

$$Y = a + b_1 \text{DAU} + \varepsilon \quad (1)$$

$$Y = a + b_2 \text{PAD} + \varepsilon \quad (2)$$

$$Y = a + b_1 \text{DAU}_t + b_2 \text{PAD}_t + \varepsilon \quad (3)$$

$$Y = a + b_1 \text{DAU}_{t-1} + b_2 \text{PAD}_{t-1} + \varepsilon \quad (4)$$

Keterangan :

Y	=	belanja daerah
a	=	konstanta
$b_1:b_2$	=	koefisien regresi
DAU_t	=	jumlah DAU tanpa lag
DAU_{t-1}	=	jumlah DAU dengan lag
PAD_t	=	jumlah PAD tanpa lag
PAD_{t-1}	=	jumlah PAD dengan lag
ε	=	error

a) Koefisien determinasi R^2

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2001:45).

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap

variabel dependen atau terikat (Kuncoro, 2001:98). Untuk menerima atau menolak dilakukan dengan membandingkan profitabilitas F hitung dengan tingkat signifikan 5%. Apabila profitabilitasnya lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti secara simultan variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Apabila signifikasinya lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka H_0 diterima, yang berarti secara simultan variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan atas uji F yang dilakukan ditentukan sebagai berikut :

- Jika profitabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima
- Jika profitabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak

c) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap nilai variabel dependen (Ghozali, 2001:44). Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Dasar pengambilan keputusan atas uji t yang dilakukan ditentukan sebagai berikut :

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak